

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada bab ini berisikan berbagai referensi, konsep, serta generalisasi dari hasil penelitian yang disajikan sebagai landasan teoritis dalam pelaksanaan penelitian untuk pembahasan dengan topik penelitian mengenai Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dan Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

2.1.1 Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

2.1.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut Muh. Arief Effendi (2016:3) menyatakan bahwa:

"*Good corporate governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan".

Sedangkan menurut Bambang Rianto Rustam (2017:294) menyatakan bahwa:

"*Corporate governance* merupakan serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak – pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan. *Corporate governance* menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, memerhatikan kebutuhan *stakeholder*, memastikan perusahaan beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan lain, serta melindungi kepentingan nasabah".

Menurut *Forum for corporate governance in Indonesia* (FCGI) dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi *cadbury comittee* dalam Hery (2010:11) mendefinisikan GCG adalah sebagai berikut:

"Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak – hal dan kewajiban mereka".

Berdasarkan ketiga pengertian di atas, dapat disimpulkan, bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, mengawasi, memelihara kepentingan *stakeholders* dan kepentingan perusahaan jangka panjang, GCG pada perusahaan BUMN dimaksudkan untuk mengatur hubungan dan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*), kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan, memastikan bahwa kesalahan dapat diperbaiki, dan mencapai tujuan perusahaan.

2.1.1.2 Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:34), terdapat empat tujuan dari *good corporate governance*, adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya sasaran yang telah di tetapkan
2. Aktiva perusahaan dijaga dengan baik
3. Perusahaan menjalankan praktik – praktik bisnis yang sehat
4. Kegiatan – kegiatan perusahaan dilakukan denagn transparan

Tujuan diterapkannya *good corporate governance* dalam perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 01/MBU/2011 Tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ.
3. Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi.

2.1.1.3 Pihak yang Terkait dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:184) mengemukakan bahwa ada delapan unsur-unsur (*person in charge*) dalam *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Saham (*Stakeholders*)
Adalah individu atau institusi yang mempunyai taruhan vital (*vital stake*) dalam perusahaan. *Corporate governance* harus melindungi hak-hak pemegang saham antara lain:
 - a. Mengamankan registrasi dan kepemilikan
 - b. Menyerahkan atau memindahkan saham
 - c. Mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu dan kontinu
 - d. Ikut serta dan memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
 - e. Memperoleh bagian atas keuntungan perusahaan
2. Komisaris dan Direksi
Secara legal bertanggung jawab untuk menetapkan sasaran korporat, mengembangkan kebijakan yang luas, dan memilih personel tingkat atas untuk melaksanakan sasaran dan kebijakan tersebut, dan juga menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan kepentingan pemegang saham dilindungi.
3. Komite Audit
Bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang

disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal memerlukan perhatian Dewan komisaris.

4. Sekretaris Perusahaan

Fungsi ini harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur perusahaan tercatat atau pejabat perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan tercatat dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan.

5. Manajer dan Karyawan

Manajer menempati posisi yang strategis karena pengetahuan mereka dan pengambilan keputusan, biasanya mengambil peranan penting dalam organisasi. Pekerja khususnya yang diwakili serikat pekerja atau mereka yang memiliki saham dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan tata kelola perusahaan tertentu.

6. Auditor Eksternal

Bertanggung jawab memberikan opini/pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan.

7. Auditor Internal

Melaksanakan pelayanan kepada organisasi secara lebih luas dengan memberikan jaminan keyakinan, konsultasi dan memastikan pelaksanaan *corporate governance*.

8. *Stakeholder* lainnya

Pemerintah terlibat dalam *corporate governance* melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. Kreditor yang memberikan pinjaman mungkin juga mempengaruhi kebijakan perusahaan.

2.1.1.4 Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Valery G. Kumat (2011:22), menyatakan terdapat empat prinsip dari *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

1. Kewajaran (*Fairness*)
2. Keterbukaan (*Transparency*)
3. Akuntabilitas (*Accountability*)
4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*).

Menurut Muh. Arief Effendi (2016:20), terdapat prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi (*Transparancy*)**
Prinsip dasar, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**
Prinsip dasar, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. **Responsibilitas (*Responsibility*)**
Prinsip dasar, perusahaan harus dapat mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate governance*.
4. **Independensi (*Independency*)**
Prinsip dasar, untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organisasi perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. **Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*)**
Prinsip dasar, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

2.1.1.5 Kriteria *Good Corporate Governance*

Menurut versi The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) dalam Muh. Arief Effendi (2016:22) ada lima kriteria dari Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu:

1. *The right of shareholders*
Hak para pemegang saham terdiri dari hak untuk menerima informasi yang relevan mengenai perusahaan pada waktu yang tepat, mempunyai peluang untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan termasuk hak dalam hal pembagian keuntungan/ laba perusahaan. Pengendalian terhadap perusahaan haruslah dilakukan secara efisien dan se-transparan mungkin.
2. *The equitable treatment of shareholders*
Adanya perlakuan adil kepada seluruh pemegang saham, khususnya bagi para pemegang saham minoritas atau asing, yang terdiri dari hak atas pengungkapan yang lengkap mengenai segala informasi perusahaan yang material. Seluruh pemegang saham dengan kelas saham yang sama harus diperlakukan secara adil. Anggota corporate board dan manajer diharuskan mengungkapkan segala kepentingan yang material atas setiap transaksi perusahaan yang telah terjadi.
3. *The role of stakeholders in corporate governance*
Peran pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan haruslah diakui melalui penetapan secara hukum. Kerangka kerja GCG harus dapat mendorong kerja sama yang aktif antara pihak perusahaan dengan stakeholders demi menciptakan pekerjaan, kemakmuran, dan perusahaan yang sehat serta financial.
4. *Disclosure and transparency*
Adanya pengungkapan dan transparansi yang akurat dan tepat waktu atas segala hal yang material terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan, serta masalah lain yang berkaitan dengan karyawan dan stakeholders. Laporan keuangan haruslah diaudit oleh pihak yang independen dan disajikan berdasarkan standar kualitas tertinggi.
5. *The responsibility of the board*
Kerangka kerja GCG harus menjamin adanya arahan, bimbingan, dan pengaturan yang strategis atas jalannya operasional maupun financial perusahaan, pemantauan dan pengawasan yang efektif oleh corporate board, dan adanya pertanggung jawaban corporate board kepada perusahaan dan pemegang saham.

2.1.2 Pengendalian Internal

2.1.2.1 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Rahayu dan Suhayati (2013:221) pengendalian internal adalah sebagai berikut:

"Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan-tujuan tertentu".

Sedangkan menurut Mulyadi (2013:6) menyatakan bahwa:

"Pengendalian intern adalah bagian dari sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen".

Definisi lain dari pengendalian intern menurut Mardi (2014:59):

"Pengendalian intern merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipenuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah".

Adapun menurut Hery (2013:159) menyatakan bahwa:

"Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan".

Berdasarkan keempat pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses pengendalian untuk menjaga harta atau *assets* perusahaan, merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur yang dipengaruhi oleh dewan direksi, komisaris, manajemen dan karyawan yang

dirancang untuk memberikan jaminan efektifitas dan efesiensi operasi perusahaan seperti biaya, waktu, beban, dan mendorong kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta menghasilkan laporan keuangan yang andal.

2.1.2.2 Unsur Pengendalian Internal

Menurut Boyton dan Johson (2006) dapat disimpulkan untuk memberikan struktur untuk mempertimbangkan banyak kontrol mungkin terkait dengan pencapaian tujuan entitas, laporan COSO mengidentifikasi lima komponen yang saling terkait dalam pengendalian internal:

1. *Control environment*

menetapkan tujuan dari sebuah organisasi, yang mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Ini adalah dasar untuk semua komponen lain dari pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. *Control environment* yang kuat terdiri dari berbagai faktor yang bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran pengendalian orang-orang yang menerapkan kontrol bagi seluruh entitas. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. *Integrity and ethical values*

Laporan COSO mencatat bahwa manajer entitas dikelola dengan baik telah semakin diterima pandangan bahwa "etika bayar bahwa perilaku etis adalah bisnis yang baik". dalam rangka untuk menekankan pentingnya integritas dan etika nilai-nilai di antara semua personil organisasi, CEO dan anggota lain dari *top management*.

b. *Commitment to competence*

Kompetensi seharusnya berhubungan terhadap pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk memenuhi tugas yang terdapat dalam suatu pekerjaan. Komitment terhadap kompetensi termasuk juga pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi tertentu atas suatu pekerjaan dan bagaimana tingkatan tersebut menerjemahkan kedalam persyaratan keahlian dan pengetahuan.

c. *Board of directors and audit committee*

Susunan dewan direksi dan komite audit dan cara di mana mereka menjalankan tanggung jawab pemerintahan dan pengawasan mereka memiliki dampak yang besar pada lingkungan pengendalian. faktor yang mempengaruhi efektivitas dewan dan komite audit meliputi kemerdekaan mereka yang diperoleh dari manajemen.

d. *Management's philosophy and operating style*

Karakteristik dapat membentuk bagian dari filsafat dan gaya operasi manajemen dan berdampak pada lingkungan pengendalian. Karakteristik

tersebut yaitu mengawasi resiko bisnis, perilaku dan tindakan terhadap laporan keuangan, pemilihan terhadap prinsip akuntansi yang ada, mengerti resiko yang terkait dengan IT.

e. *Organizational structure*

Struktur organisasi dalam suatu organisasi perusahaan bertujuan menyediakan kerangka kerja untuk aktivitas dalam mencapai tujuan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Hal yang cukup signifikan dalam struktur organisasi adalah area kunci atas wewenang, tanggung jawab dan ketepatan pelaporan.

f. *Assignment of authority and responsibility*

Tugas wewenang dan tanggung jawab meliputi keterangan tentang bagaimana dan kepada siapa wewenang dan tanggung jawab untuk semua kegiatan entitas ditandatangani, dan harus memungkinkan setiap individu untuk mengetahui bagaimana tindakannya saling berhubungan dengan orang lain untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan entitas dan untuk apa diadakan tanggung jawab bagi setiap individu.

g. *Human resources policies and practices.*

Kebijakan dan praktek dalam pengelolaan sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketercukupan tenaga kerja dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia ini seperti kebijakan perusahaan dalam prosedur perekrutan, program magang, pelatihan, evaluasi, *counseling*, promosi, kompensasi dan tindakan perbaikan. Di beberapa perusahaan, kebijakan yang diterapkan bisa saja tidak diformalkan, tetapi tetap ada dan dikomunikasikan.

2. *Risk assessment*

Identifikasi dan analisis risiko yang relevan dengan pencapaian tujuannya entitas, membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

3. *Control activities*

kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa manajemen yang diarahkan telah dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

a. *Authorization controls*

Tujuan utama dari prosedur otorisasi yang tepat adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi disetujui oleh personil manajemen yang bertindak dalam lingkup kewenangannya.

b. *Segregation of duties*

Pemisahan yang kuat dari tugas melibatkan pemisahan otorisasi transaksi, mempertahankan hak atas aset, dan menjaga akuntabilitas pencatatan dalam catatan akuntansi. Kegagalan untuk mempertahankan pemisahan tugas memungkinkan bagi seorang individu untuk melakukan kesalahan atau penipuan dan kemudian berada dalam posisi untuk menyembunyikan dalam normal kegiatan tugas yang dilakukan.

c. *Information processing controls*

Kontrol pengolahan informasi mengatasi risiko yang terkait dengan otorisasi, kelengkapan dan keakuratan transaksi. Kontrol ini sangat relevan dengan audit laporan keuangan. Kebanyakan entitas, terlepas dari ukurannya sekarang menggunakan komputer untuk pengolahan informasi secara umum dan pada khususnya untuk sistem akuntansi. Dalam kasus tersebut, hal ini berguna untuk lebih mengelompokkan kontrol pengolahan informasi sebagai kontrol umum dan pengendalian aplikasi.

d. *Physical controls*

Kontrol fisik bersangkutan dengan membatasi dua jenis akses ke aset dan catatan penting yaitu akses fisik langsung dan akses langsung melalui penyusunan atau pengolahan dokumen seperti pesanan penjualan dan *voucher* pencairan yang mengizinkan penggunaan atau disposisi *asset*.

e. *Performance review*

Contoh penilaian kinerja meliputi tinjauan manajemen dan analisis laporan yang meringkas detail dari saldo rekening seperti neraca saldo umur piutang, laporan pengeluaran kas oleh departemen atau laporan kegiatan penjualan dan laba kotor oleh pelanggan atau wilayah, penjual, atau jajaran produk, kinerja aktual terhadap anggaran, perkiraan, atau jumlah periode sebelumnya, serta hubungan set data yang berbeda seperti data operasi *nonfinancial* dan data keuangan.

4. *Information and communication* adalah identifikasi, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka.
5. *Monitoring* adalah proses yang menilai kualitas internal kinerja kontrol.

Sedangkan menurut Mulyadi (2017:130) unsur pokok sistem pengendalian internal ada 4 unsur, yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
3. Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan

terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

2.1.2.3 Tujuan Pengendalian Internal

Pengertian pengendalian internal yang diberikan tercakup pula tujuan dari sistem pengendalian intern itu sendiri yang menurut Mulyadi (2013:163) dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Pengendalian intern akuntansi
Pengendalian intern akuntansi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin kekayaan para investor dan kreditor yang ditanamkan dalam perusahaan yang akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.
2. Pengendalian intern administratif
Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sedangkan menurut Arens, Elder, dan Beasley (2015:340), biasanya manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif yaitu:

1. Reliabilitas pelaporan keuangan
Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

2. Efisiensi dan efektivitas operasi

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.

3. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain mematuhi ketentuan hukum dalam Section 404, organisasi organisasi publik, nonpublik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti UU perlindungan lingkungan dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

2.1.2.4 Komponen-Komponen Pengendalian Internal

Menurut Wiratna Sujarweni (2015:71) pengendalian internal memiliki 5 komponen utama sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian internal yang baik. Beberapa komponen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian internal adalah:

- a. Komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Dalam perusahaan harus selalu ditanamkan etika di mana jika etika itu dilanggar itu merupakan penyimpangan. Contoh: datang tepat waktu adalah suatu etika yang baik dan begitu sebaliknya.
- b. Filosofi yang dianut oleh manajemen dan gaya operasional yang dipakai oleh manajemen, artinya di sini bahwa manajemen akan menegakkan peraturan. Jika yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas.
- c. Struktur Organisasi
 - a. Metode pembagian tugas dan tanggung jawab. Dalam perusahaan harus jelas dan tegas dalam mencegah segala bentuk *fraud* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - b. Kebijakan dan praktik yang menyangkut sumber daya manusia. Perusahaan dalam memilih karyawan harus selektif dan melalui prosedur tes yang semestinya bukan nepotisme, kecurangan dan sejenisnya.
 - c. Pengaruh dari luar. Apabila lingkungan dalam perusahaan sudah baik, maka pengaruh dari luar yang buruk akan mudah bersama-sama ditangkal dan pengaruh yang baik akan lebih mudah diterima.

2. Penaksiran Risiko

Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko, manajemen dapat mengambil tindakan atas segala pencegahan kecurangan, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar. Ada tiga kelompok risiko yang dihadapi perusahaan, yaitu:

- a. Risiko strategis, yaitu mengerjakan sesuatu dengan cara yang salah (misalnya: harusnya dikerjakan dengan komputer ternyata dikerjakan secara manual).
- b. Risiko finansial, yaitu risiko menghadapi kerugian keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena uang hilang, dihambur hamburkan, atau dicuri.
- c. Risiko informasi, yaitu menghasilkan informasi yang tidak relevan atau informasi yang keliru, atau bahkan sistem informasinya tidak dapat dipercaya yang mengandung segala bentuk *fraud*.

3. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan. *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* mengidentifikasi setidaknya-tidaknya ada lima hal yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yaitu:

- a. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan.
Otorisasi dengan cara membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari atasan. Contoh: untuk meminta pergantian peralatan kantor maka bagian pembelian harus meminta persetujuan dari pimpinan dari bagian keuangan, persetujuan dari pimpinan keuangan itu dibuktikan dengan tanda tangan.
- b. Pembagian tugas dan tanggung jawab.
Pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi yang telah dibuat perusahaan.
- c. Rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik.
Dokumen sebaiknya mudah dipakai oleh karyawan, dokumen dibuat dengan bahan yang berkualitas agar bertahan lama jika disimpan.
- d. Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan.
Perlindungan yang ketat dalam mengurangi serta mencegah indikasi kecurangan yang terjadi ini meliputi:
 - a. Antara pencatat dan pembawa kas harus berbeda orangnya.
 - b. Tersedia tempat penyimpanan yang baik.
 - c. Pembatasan akses ruang – ruang yang penting

- e. Pemeriksaan terhadap kinerja perusahaan. Pemeriksaan kinerja ini dapat dilakukan dengan salah satu langkah berikut:
 1. Membuat rekonsiliasi/pencocokan antara catatan perusahaan dengan bank, maupun rekonsiliasi antara dua catatan yang terpisah mengenai suatu rekening.
 2. Melakukan stok opname yaitu mencocokkan jumlah unit persediaan di gudang dengan catatan persediaan.
 3. Menjumlah berbagai hitungan dengan cara batch totals, yaitu penjumlahan dari atas ke bawah.
4. Informasi dan Komunikasi
- Kecurangan dapat dicegah dengan merancang sistem informasi perusahaan dan manajemen puncak harus mengetahui hal-hal berikut ini:
- a. Bagaimana transaksi diawali.
 - b. Bagaimana data dicatat ke dalam formulir yang siap dimasukkan ke sistem komputer.
 - c. Bagaimana file data dibaca, diorganisasi, dan diperbaharui isinya.
 - d. Bagaimana data diproses agar menjadi informasi dan informasi diproses lagi menjadi informasi yang lebih berguna bagi pembuat keputusan.
 - e. Bagaimana informasi yang baik dilakukan.
 - f. Bagaimana transaksi berhasil
5. Pemantauan
- Pemantauan adalah kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan, dapat segera diambil tindakan, dalam hal ini ketika ada indikasi *fraud* bisa langsung dilakukan pencegahan. Berbagai bentuk pemantauan di dalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan salah satu atau semua proses berikut ini:
- a. Supervisi yang efektif, yaitu manajemen yang lebih atas dapat mengawasi manajemen dan karyawan di bawahnya.
 - b. Akuntansi pertanggungjawaban yaitu perusahaan menerapkan suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja masing-masing manajer, masing-masing departemen, dan masing-masing proses yang dijalankan oleh perusahaan.
 - c. Audit internal yaitu pengauditan terhadap indikasi dan pencegahan kecurangan dan manipulasi yang dilakukan oleh auditor di dalam perusahaan.

Sedangkan menurut Arens, Elder, dan Beasley (2015:345), *Internal Control- Integrated Framework* yang dikeluarkan COSO, yaitu kerangka kerja pengendalian internal yang paling luas diterima di Amerika Serikat, menguraikan

lima komponen pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai. Komponen pengendalian internal COSO meliputi hal-hal berikut ini:

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*) terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas itu. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian yang paling penting.
 - a. Integritas dan nilai-nilai etis, meliputi tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin membuat karyawan melakukan tindakan tidak jujur, ilegal, atau tidak etis. Ini juga meliputi pengkomunikasian nilai-nilai entitas dan standar perilaku kepada para karyawan melalui pernyataan kebijakan, kode perilaku, dan teladan.
 - b. Komitmen pada kompetensi, meliputi pertimbangan manajemen tentang tingkat kompetensi bagi pekerjaan tertentu, dan bagaimana tingkatan tersebut diterjemahkan menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.
 - c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit, berperan penting dalam tata kelola korporasi yang efektif karena memikul tanggung jawab akhir untuk memastikan bahwa manajemen telah mengimplementasikan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan yang layak.
 - d. Filosofi dan gaya operasi manajemen, dimana manajemen melalui aktivitasnya, memberikan isyarat yang jelas kepada karyawan tentang pentingnya pengendalian internal. Sebagai contoh, apakah manajemen mengambil risiko yang cukup besar, atau justru menghindari risiko tersebut? Apakah target penjualan dan laba tidak realistis, dan apakah karyawan didorong untuk melakukan tindakan yang agresif guna mencapai target tersebut memahami aspek ini serta aspek-aspek ini serupa dalam filosofi dan gaya operasi manajemen akan membuat auditor dapat merasakan sikap manajemen tentang pengendalian internal.
 - e. Struktur organisasi, menentukan garis-garis tanggung jawab dan kewenangan yang ada.
 - f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.
2. Penilaian risiko (*risk assessment*) atas pelaporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP.

3. Aktivitas pengendalian (*control activities*) adalah kebijakan dan prosedur, selain yang sudah termasuk dalam empat komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian dibagi menjadi lima jenis yaitu:
 - a. Pemisahan tugas yang memadai
 - b. Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas
 - c. Dokumen dan catatan yang memadai
 - d. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan
 - e. Pemeriksaan kinerja secara independen

4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*) bertujuan untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait. Untuk memahami perancangan sistem informasi akuntansi, auditor menentukan:
 - a. Kelas transaksi utama entitas
 - b. Bagaimana transaksi dimulai dan dicatat
 - c. Catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya
 - d. Bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan, seperti penurunan nilai aktiva
 - e. Sifat serta rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti, termasuk prosedur pencatatan transaksi dan penyesuaian dalam buku besar umum.

5. Pemantauan (*monitoring*) berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan, dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi.

2.1.2.5 Indikator Pengendalian Internal

Menurut Wiratna Sujarweni (2015:71) pengendalian internal memiliki 5 komponen utama sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian internal yang baik. Beberapa komponen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian internal adalah:
 - a. Komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Dalam perusahaan harus selalu ditanamkan etika di mana jika etika itu dilanggar itu merupakan penyimpangan. Contoh: datang tepat waktu adalah suatu etika yang baik dan begitu sebaliknya.
 - b. Filosofi yang dianut oleh manajemen dan gaya operasional yang dipakai oleh manajemen, artinya di sini bahwa manajemen akan menegakkan peraturan. Jika yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas.

- c. Struktur Organisasi:
1. Metode pembagian tugas dan tanggung jawab. Dalam perusahaan harus jelas dan tegas dalam mencegah segala bentuk *fraud* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 2. Kebijakan dan praktik yang menyangkut sumber daya manusia. Perusahaan dalam memilih karyawan harus selektif dan melalui prosedur tes yang semestinya bukan nepotisme, kecurangan dan sejenisnya.
 3. Pengaruh dari luar. Apabila lingkungan dalam perusahaan sudah baik, maka pengaruh dari luar yang buruk akan mudah bersama-sama ditangkal dan pengaruh yang baik akan lebih mudah diterima.
2. Penaksiran Risiko
- Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko, manajemen dapat mengambil tindakan atas segala pencegahan kecurangan, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar. Ada tiga kelompok risiko yang dihadapi perusahaan, yaitu:
- a. Risiko strategis, yaitu mengerjakan sesuatu dengan cara yang salah (misalnya: harusnya dikerjakan dengan komputer ternyata dikerjakan secara manual).
 - b. Risiko finansial, yaitu risiko menghadapi kerugian keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena uang hilang, dihambur-hamburkan, atau dicuri.
 - c. Risiko informasi, yaitu menghasilkan informasi yang tidak relevan atau informasi yang keliru, atau bahkan sistem informasinya tidak dapat dipercaya yang mengandung segala bentuk *fraud*.
3. Aktivitas Pengendalian
- Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan. *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) mengidentifikasi setidaknya-tidaknya ada lima hal yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yaitu:
- a. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan.
Otorisasi dengan cara membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari atasan. Contoh: untuk meminta pergantian peralatan kantor maka bagian pembelian harus meminta persetujuan dari pimpinan dari bagian keuangan, persetujuan dari pimpinan keuangan itu dibuktikan dengan tanda tangan.
 - b. Pembagian tugas dan tanggung jawab.
Pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi yang telah dibuat perusahaan.
 - c. Rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik.
Dokumen sebaiknya mudah dipakai oleh karyawan, dokumen dibuat dengan bahan yang berkualitas agar bertahan lama jika disimpan.

- d. Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan. Perlindungan yang ketat dalam mengurangi serta mencegah indikasi kecurangan yang terjadi ini meliputi:
 - 1. Antara pecatat dan pembawa kas harus berbeda orangnya.
 - 2. Tersedia tempat penyimpanan yang baik.
 - 3. Pembatasan akses ruang – ruang yang penting
 - e. Pemeriksaan terhadap kinerja perusahaan. Pemeriksaan kinerja ini dapat dilakukan dengan salah satu langkah berikut:
 - 1. Membuat rekonsiliasi/pencocokan antara catatan perusahaan dengan bank, maupun rekonsiliasi antara dua catatan yang terpisah mengenai suatu rekening.
 - 2. Melakukan stok opname yaitu mencocokkan jumlah unit persediaan di gudang dengan catatan persediaan.
 - 3. Menjumlah berbagai hitungan dengan cara batch totals, yaitu penjumlahan dari atas ke bawah.
4. Informasi dan Komunikasi
- Kecurangan dapat dicegah dengan merancang sistem informasi perusahaan dan manajemen puncak harus mengetahui hal-hal berikut ini:
- a. Bagaimana transaksi diawali.
 - b. Bagaimana data dicatat ke dalam formulir yang siap dimasukkan ke sistem komputer.
 - c. Bagaimana file data dibaca, diorganisasi, dan diperbaharui isinya.
 - d. Bagaimana data diproses agar menjadi informasi dan informasi diproses lagi menjadi informasi yang lebih berguna bagi pembuat keputusan.
 - e. Bagaimana informasi yang baik dilakukan.
 - f. Bagaimana transaksi berhasil
5. Pemantauan
- Pemantauan adalah kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan, dapat segera diambil tindakan, dalam hal ini ketika ada indikasi *fraud* bisa langsung dilakukan pencegahan. Berbagai bentuk pemantauan di dalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan salah satu atau semua proses berikut ini:
- a. Supervisi yang efektif, yaitu manajemen yang lebih atas dapat mengawasi manajemen dan karyawan di bawahnya.
 - b. Akuntansi pertanggungjawaban yaitu perusahaan menerapkan suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja masing-masing manajer, masing-masing departemen, dan masing-masing proses yang dijalankan oleh perusahaan.
 - c. Audit internal yaitu pengauditan terhadap indikasi dan pencegahan kecurangan dan manipulasi yang dilakukan oleh auditor di dalam perusahaan.

2.1.3 Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

2.1.3.1 Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Amin Widjaja Tunggal (2016:1) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) bahwa: "Sebagai konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain".

Selanjutnya menurut Hery (2016:1) menyatakan bahwa:

"Kecurangan menggambarkan setiap penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain".

Sedangkan Menurut Karyono (2013:47) mendefinisikan pencegahan kecurangan adalah sebagai berikut:

"Mencegah *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko terjadinya kecurangan (*fraud*)".

Menurut Fitrawansyah (2014:16) menyatakan bahwa pencegahan kecurangan adalah sebagai berikut:

"Pencegahan kecurangan (*fraud*) bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu dibandingkan bila auditor internal berhasil mencegahnya, tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku *fraud* tersebut. Dan bila *fraud* sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya daripada melakukan pencegahan sejak dini".

Berdasarkan keempat uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan tindakan penyimpangan yang melanggar hukum, penipuan yang disengaja dan situasi dimana seseorang mempunyai kesempatan untuk mengambil aset atau hak orang lain. Kecurangan dapat dicegah dengan mengaktifkan pengendalian internal dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, di dukung oleh seluruh pelaku organisasi baik manajer maupun seluruh karyawan.

2.1.3.2 Bentuk-Bentuk Kecurangan (*FRAUD*)

Menurut Examination Manual 2006 dari *Association of Certified Fraud Examiner* dalam Karyono (2013:17) fraud terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

1. Kecurangan Laporan (*Fraudulent Statemen*)
Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) yang terdiri atas kecurangan laporan keuangan (*Financial Statement*) dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebenarnya (*over statement*) dan lebih buruk dari sebenarnya (*under statement*) dan kecurangan laporan lain (*Non Financial Statement*).
2. Penyalahgunaan aset (*Aset Misappropriation*)
Kecurangan penyalahgunaan aset (*aset misappropriation*) yang terdiri atas sebagai berikut:
 - a. Kecurangan Kas, terdiri atas kecurangan penerimaan kas sebelum dicatat (*skimming*), kecurangan kas setelah dicatat (*larceny*), dan kecurangan pengeluaran kas (*fraudulent disburshment*) termasuk kecurangan penggantian biaya (*expense disburshment scheme*).
 - b. Penyalahgunaan persediaan dan aset lain (*inventory and other asets misappropriation*), yang terdiri dari pencurian (*larceny*) dan penyalahgunaan (*misuse*). *Larceny scheme* dimaksudkan sebagai pengambilan persediaan atau barang di gudang karena penjualan atau pemakaian untuk perusahaan tanpa ada upaya untuk menutupi pengambilan tersebut dalam akuntansi atau catatan gudang. Diantaranya yaitu penjualan fiktif (*fictious sell*), aset *requisition* dan *transfer scheme*, kecurangan pembelian dan penerimaan, membuat jurnal palsu, menghapus persediaan (*inventory write off*). Kecurangan persediaan barang dan aset lainnya yang berupa penyalahgunaan (*misuse*) aset pada umumnya sulit untuk dikuantifikasikan akibatnya. Sebagai contoh kasus ini misalkan pelaku menggunakan peralatan kantor saat jam kerja untuk

kegiatan usaha sampingan pelaku. Hal itu berakibat pula hilangnya peluang bisnis bila kegiatannya merupakan usaha sejenis. Selain itu peralatannya akan lebih cepat rusak.

- c. Korupsi, Kata korupsi berarti kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral. dan penyimpangan dari kesucian. Secara umum dapat didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu korupsi terjadi pada organisasi korporasi swasta dan pada sektor publik/pemerintah. Adapun bentuk korupsi yaitu:
 1. Pertentangan kepentingan (*Conflict of Interest*)
 2. Suap (*Bribery*)
 3. Pemberian tidak sah (*Illegal Grativies*)
 4. Pemerasan ekonomi (*Economic Exortion*)
3. Kecurangan yang Berkaitan dengan Komputer Terjadi perkembangan kejahatan di bidang komputer dan contoh tindak kejahatan yang dilakukan sekarang antara lain:
- b. Menambah, menghilangkan atau mengubah masukan atau memasukan data palsu.
 - c. Salah mem-posting atau mem-posting sebagian transaksi saja.
 - d. Memproduksi keluaran palsu, menahan, menghancurkan, mencuri keluaran.
 - e. Merusak program misalnya mengambil uang dari banyak rekening dalam jumlah kecil-kecil.
 - f. Mengubah dan menghilangkan master file.
 - g. Mengabaikan pengendalian intern untuk memperoleh akses ke informasi rahasia.
 - h. Melakukan sabotase.
 - i. Mencuri waktu penggunaan komputer.
 - j. Melakukan pengamatan elektronik dari data saat dikirim.

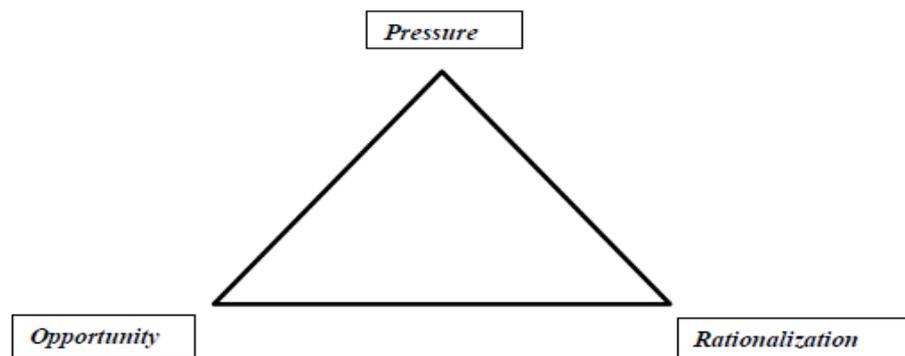
Sedangkan menurut Irwan Sofjan dalam Nur Azizah (2014), kecurangan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Kecurangan Non-manajemen
Kecurangan non-manajemen ini merupakan tindakan tidak jujur yang terjadi dalam suatu organisasi/perusahaan walaupun manajemen menciptakan langkah-langkah dan usaha-usaha tertentu untuk mencegahnya.
2. Kecurangan Manajemen
Kecurangan manajemen pada umumnya adalah menerbitkan laporan keliru (*misleading*), dengan maksud memberikan gambaran keuntungan perusahaan yang benar atau keuangan yang sehat. Kecurangan manajemen ini terjadi apabila pemimpin tertinggi dalam suatu organisasi/perusahaan membohongi para pemegang saham, kreditur, pemerintah, maupun pemeriksa independen.

3. Kecurangan Komputer

Dalam melakukan kecurangan komputer dilakukan dengan cara memanipulasi program-program komputer, file data, proses operasi, peralatan atau media komputer lainnya yang mengakibatkan kerugian pada organisasi/perusahaan yang menggunakan komputer tersebut.

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang menyebabkan Terjadinya Kecurangan (*FRAUD*)



Gambar 2.1

Segitiga Kerurangan (*Fraud Triangle*)

Sumber : Amin Widjaja Tunggal (2016:4)

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2016:4) terdapat tiga faktor seseorang

melakukan kecurangan yang dikenal dengan istilah *fraud triangle*, yaitu:

1. *Pressure* (Tekanan)

Tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong seorang berani melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Faktor ini berasal dari individu si pelaku dimana ia merasa bahwa tekanan kehidupan yang begitu berat memaksa si pelaku melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadinya. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan jaminan kesejahteraan yang ditawarkan perusahaan atau organisasi tempat ia bekerja kurang atau pola hidup serba mewah sehingga si pelaku terus-menerus merasa kekurangan. Namun tekanan juga dapat berasal dari lingkungan tempatnya bekerja. Seperti: lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, karyawan merasa diperlakukan secara adil, adanya proses penerimaan yang tidak *fair*.

2. *Opportunity* (Kesempatan)

Merupakan faktor yang sepenuhnya berasal dari luar individu, yakni berasal dari organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan. Kesempatan melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Dengan kedudukan yang dimiliki, si pelaku merasa memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan. Ditambah lagi dengan sistem pengendalian dari organisasi yang kurang memadai.

3. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Pelaku merasa memiliki alasan yang kuat yang menjadi dasar untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Serta mempengaruhi pihak lain untuk menyetujui apa yang dia lakukan.

Sedangkan menurut standar audit yang dikutip oleh Hery (2016:200), ada tiga kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan, antara lain:

1. Insentif atau tekanan, manajemen maupun karyawan memiliki insentif, dorongan, atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
2. Peluang, keadaan yang memberi peluang atau kesempatan bagi manajemen maupun karyawan untuk melakukan kecurangan.
3. Perilaku pembenaran atas tindakan, suatu perilaku atau karakter yang membuat manajemen maupun karyawan melakukan tindakan yang tidak jujur, atau lingkungan yang membuat mereka bertindak tidak jujur dan membenarkan tindakan tidak jujur tersebut.

2.1.3.4 Indikator Pencegahan Kecurangan (*FRAUD*)

Amin Widjaja Tunggal (2012:59) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tata kelola perusahaan untuk mencegah *fraud* diantaranya sebagai berikut:

1. Budaya Jujur dan Etika Tinggi

Riset menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah dan menghalangi *fraud* adalah mengimplementasikan program serta pengendalian anti *fraud*, yang di dasarkan pada nilai-nilai yang dianut perusahaan. Nilai-nilai semacam itu menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku dan ekspektasi yang dapat diterima, bahwa pegawai dapat menggunakan nilai itu untuk mengarahkan tindakan mereka. Nilai-nilai itu membantu menciptakan budaya jujur dan etika yang menjadi dasar bagi tanggung jawab pekerjaan para karyawan. Menciptakan budaya jujur dan etika tinggi mencakup enam unsur:

 - a. Menetapkan *tone at the top*

Manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab untuk menetapkan “*Tone at the Top*” terhadap perilaku etis dalam perusahaan. Kejujuran dan integritas manajemen akan memperkuat kejujuran serta integritas karyawan di seluruh organisasi. *Tone at the Top* yang dilandasi kejujuran dan integritas akan menjadi dasar bagi kode etik perilaku yang lebih terinci, yang dapat dikembangkan untuk memberikan pedoman yang lebih khusus mengenai perilaku yang diperbolehkan dan dilarang.

- b. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Positif
Dari riset yang dilakukan terlihat bahwa pelanggaran lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang atasan mereka ketimbang bila mereka merasa diperalat, diancam, atau diabaikan. Tempat kerja yang positif dapat mendongkrak semangat karyawan, yang dapat mengurangi kemungkinan karyawan melakukan fraud terhadap Perusahaan.
 - c. Mempekerjakan dan Mempromosikan Pegawai yang Tepat
Agar berhasil mencegah fraud, perusahaan yang dikelola dengan baik mengimplementasikan kebijakan penyaringan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan mempekerjakan dan mempromosikan orang-orang yang tingkat kejujurannya rendah, terutama yang akan menduduki jabatan yang bertanggung jawab atau penting. Kebijakan semacam itu mungkin mencakup pengecekan latar belakang orang-orang yang dipertimbangkan akan dipekerjakan atau dipromosikan menduduki jabatan yang bertanggung jawab atau penting. Pengecekan latar belakang memverifikasi pendidikan, riwayat pekerjaan, serta referensi pribadi calon karyawan, termasuk referensi tentang karakter dan integritas. Setelah seorang pegawai diangkat, evaluasi yang berkelanjutan atas kepatuhan pegawai itu pada nilai-nilai dan kode perilaku perusahaan juga akan mengurangi kemungkinan *fraud*.
 - d. Pelatihan
Semua pegawai baru harus dilatih tentang ekspektasi perusahaan menyangkut perilaku etis pegawai. Pegawai harus diberi tahu tentang tugasnya untuk menyampaikan *fraud* aktual atau yang dicurigai serta cara yang tepat untuk menyampaikannya. Selain itu, pelatihan kewaspadaan terhadap *fraud* juga harus disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan khusus pegawai itu, misalnya, pelatihan yang berbeda untuk agen pembelian dan penjualan.
 - e. Konfirmasi
Sebagian perusahaan mengharuskan pegawainya untuk secara periodik mengkonfirmasi tanggung jawabnya mematuhi kode perilaku. Pegawai diminta untuk menyatakan bahwa mereka memahami ekspektasi perusahaan serta sudah mematuhi kode perilaku, dan mereka tidak mengetahui adanya pelanggaran. Konfirmasi tersebut akan membantu mengokohkan kebijakan kode perilaku dan juga membantu menghalangi pegawai melakukan *fraud* atau pelanggaran etika lainnya.
2. Tanggung jawab Manajemen untuk Mengevaluasi Pencegahan *fraud*
Fraud tidak mungkin terjadi tanpa adanya kesempatan untuk melakukannya dan menyembunyikan perbuatan itu. Manajemen

bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mencegah *fraud*, mengambil langkah-langkah yang teridentifikasi untuk mencegah *fraud*, serta memantau pengendalian internal yang mencegah dan mengidentifikasi *fraud*.

3. Pengawasan oleh Komite Audit

Komite audit mengemban tanggung jawab utama mengawasi pelaporan keuangan serta proses pengendalian internal organisasi. Dalam memenuhi tanggung jawab ini komite audit memperhitungkan potensi diabaikannya pengendalian internal oleh manajemen serta mengawasi proses pencegahan *fraud* oleh manajemen, dan program serta pengendalian anti *fraud*. Komite audit juga membantu menciptakan “*tone at the top*” yang efektif tentang pentingnya kejujuran dan perilaku etis dengan mendukung toleransi nol manajemen terhadap *fraud*.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian (Suginam, 2016).

Seiring dengan semakin berkembangnya perusahaan, maka kegiatan dan masalah yang dihadapi perusahaan akan semakin kompleks sehingga semakin sulit untuk mengawasi seluruh kegiatan dan operasi perusahaan, dimana semakin besar kemungkinan untuk terjadinya *fraud*. Masalah-masalah *fraud* yang muncul dalam perusahaan merupakan tanda bahwa terdapat fungsi di dalam perusahaan yang tidak dilaksanakan secara taat dan konsisten, dampaknya tata kelola perusahaan menjadi tidak sehat. Oleh karena itu perlu adanya pencegahan *fraud* sedini mungkin untuk menghindari terjadinya tindak kecurangan (*fraud*). Mengatasi hal ini, yang harus di berdayakan secara konsisten adalah penerapan prinsip GCG, pengendalian intern, dan peran audit internal yang dapat memicu terlaksananya pengendalian risiko

manajemen yang mempunyai peran penting dalam berbagai aspek organisasi yang termasuk di dalamnya adalah pencegahan *fraud*.

2.2.1 Penerapan Prinsip GCG Berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Karyono (2013:69) berpendapat bahwa:

“Berbagai prinsip *good corporate governance* bila di terapkan akan dapat mencegah kecurangan (*fraud*) karena prinsipnya bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindari kejahatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi menyangkut pula tentang keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas dan ada media kontrol masyarakat”.

Menurut Diaz (2013:184) menyatakan bahwa:

“Pencegahan kecurangan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan *fraud* dengan membangun dan menerapkan manajemen risiko (khususnya manajemen risiko *fraud*), pengendalian intern dan tata kelola perusahaan yang jujur”.

Selain itu Fitrawansyah (2014:15) menyatakan bahwa:

“Dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan (*fraud*) sebenarnya ada beberapa pihak yang terkait yaitu *good corporate governance* dan *transaction level control process*. *Good corporate governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*”.

Menurut Sitti Fitratul Jannah (2016) penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* Bank Perkreditan Rakyat. Diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik oleh perusahaan akan dapat mencegah terjadinya tindakan *fraud*. Hal ini tidak hanya berlaku bagi BPR, beberapa penelitian juga telah membuktikan bahwa BUMN, SKPD, ataupun bank umum

dapat mencegah dan mengurangi terjadinya *fraud* dengan diterapkannya *good corporate governance*.

Menurut penelitian Fahd Nadia, Sukarmanto, dan Purnamasari (2018) menyebutkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

2.2.2 Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Tuanakotta (2010:162) menyatakan bahwa:

"Upaya mencegah *fraud* dimulai dari pengendalian internal. Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Disamping pengendalian internal, dua konsep penting lainnya dalam pencegahan *fraud*, yakni menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* (*fraud awareness*) dan upaya menilai risiko terjadinya *fraud* (*fraud risk assesment*)".

Sedangkan menurut Mirza Maulinarhadi dan Max Advian (2013:161) menyatakan bahwa:

“Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan (*fraud*)”.

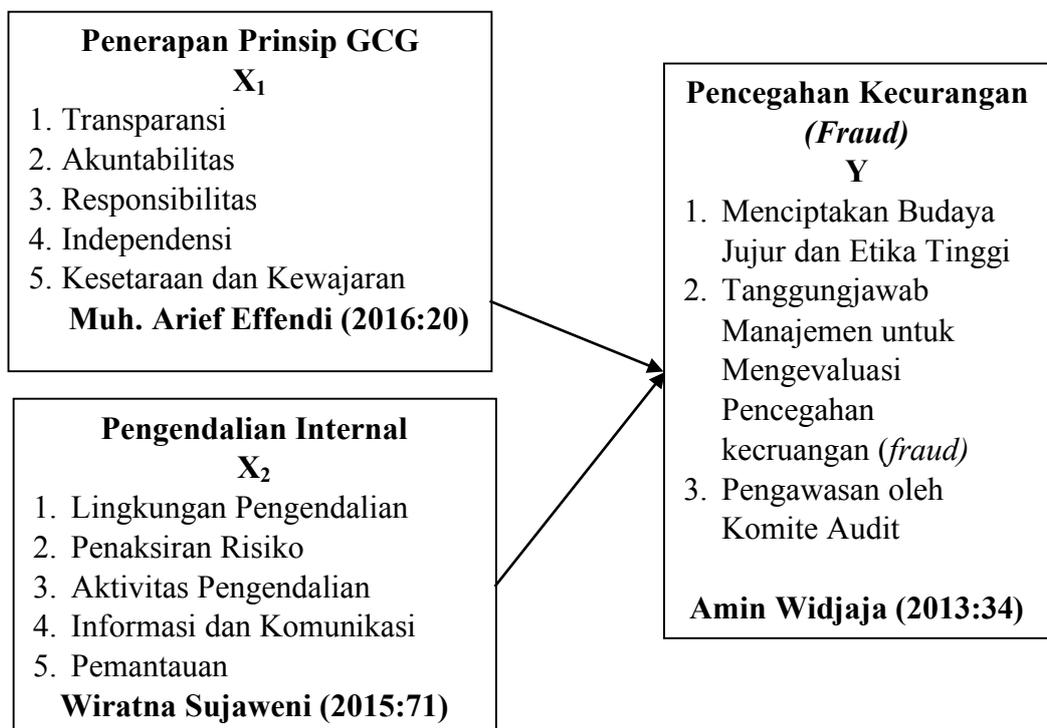
Selain itu, Rahayu dan Suhayati (2013:64) menyebutkan bahwa:

"Pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dilaksanakan dengan cara meningkatkan pengendalian internal".

Menurut Fitroh Nurani (2016) efektifitas pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Telkom *Foundation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik efektifitas pengendalian internal perusahaan, akan diikuti pula oleh semakin baiknya pencegahan *fraud*.

Menurut Rusman Soleman (2013) pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan pencegahan *fraud* dilakukan melalui pengendalian internal dengan cara mengurangi tekanan, kesempatan dan perbaikan moral individu pada setiap level dalam organisasi.

Gambar 2.2
Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis

2.3 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2015:64), pengertian hipotesis merupakan:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori-teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
- H₂ : Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.